

## INTISARI

### KEBERADAAN JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DALAM UPAYA MENYELAMATKAN KEKAYAAN NEGARA

Oleh:

**Syamsial Kadir**

**Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada**

Penelitian ini merupakan penelitian *juridis normatif* yang terdiri dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Data primer diperoleh dari responden di lapangan yakni dari beberapa orang Jaksa senior serta Hakim dan Pengacara dengan cara wawancara dan kuesioner serta dari sekretariat DPR RI, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Kejaksaan diberikan peranan dalam Undang-undang Perseroan adalah berkaitan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata sebagaimana termaktub dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dan dalam pelaksanaan-nya ditangani oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Pengertian melanggar kepentingan umum menurut Kejaksaan adalah pelanggaran terhadap kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat luas atau umum. Kategori sebuah perseroan telah melanggar kepentingan umum antara lain adalah jika sebuah perseroan melakukan prakek-praktek yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sedangkan alasan perseroan adalah karena terbatasnya anggaran dan kurangnya intelijen yustisi Kejaksaan serta faktor-faktor teknis seperti kurangnya sumber daya dan profesionalitas dalam menguasai hukum perseroan dan perusahaan, dan didalam pelaksanaannya Kejaksaan lebih banyak menempuh cara-cara persuasif dan win-win solution bagi semua pihak dari pada harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

## **ABSTRACT**

### **THE EXISTENCE OF THE DEPUTY ATTORNEY GENERAL FOR CIVIL CASES AND STATE ADMINISTRATION DEFFENSIF OF ASSETS NATION**

by  
Syamsiah Kadir  
Post Graduate Study of Gadjah Mada University

This research is a normative legal research, which comprises field research and library research. Primary data were obtained from respondents in the field, namely a number of senior prosecutors, judges and lawyer through interviews and a questionnaire as well as from the secretariat of the House of Representative. The secondary data were collected from library research.

The result of the research indicates that the role given to the Prosecution as specified in the Company Law is related to the duties and authority of the Prosecution in civil cases as stated in article 27, Act number 5 of 1991 concerning the Counsel of the Prosecution, which are implemented by the Deputy Attorney General For Civil Cases and State Administration, Violation of public interest is defined by the Prosecution as offences against the interest of the nation and state as well as the general public. A partnership is considered to have violated public interest if it as engaged in prtices prohibited by act Number 5 of 1999 concerning monopolistic practices and unhealthy business competition. The reasons for the failure of the Prosecution in exercising its authority in the dissolution of partnerships are because of the limited of Prosecution budget and intelligence justice and also technical factors such as its lack adeguate human resources and professionalism regarding company law, and the fact that In practice the Prosecution tends to adopt a persuasive prosedure and win-win solution for all parties concerned instead of filing a request to the District Court.